

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syafri Arief; Jumadi; 2016. "PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR." *Pendidikan Ilmu Sosial*: 423–36.
- Afiyanti, Yati. 2008. "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif." *Keperawatan Indonesia*.
- Agostino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : IKAPI.
- Aji, Dudun Saputra. 2014. "Implementasi Kebijakan Jampersal Di KOTA Jogjakarta Tahun 2012."
- Aldi, B. Elnath. 2015. "Upaya Generalisasi Konsep Manajemen Strategik." *Ilmu Ekonomi dan Sosial (2)*: 56–72.
- Aneta, Asna. 2010. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1).
- Ashari, Masjudin. 2015. "ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA ( STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013 ) ( An Analysis of Regional Development Planning in North Lombok Regency : A Case Study of Participatory Planning from 2009-2013 )."
- Balqis, Nadya. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Aceh Barat*. *Jurnal Public Policy* Vol 7 No 2 (2021).
- Bandur, Dyah Budiastuti; Agustinus. 2018. *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Asli. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Cahyadi, Adi. 2003. "E-GOVERNMENT: SUATU TINJAUAN KONSEP DAN PERMASALAHAN." : 1–12.
- Darmanto, Eko, Noor Latifah, and Nanik Susanti. 2014. "Penerapan Metode Ahp (Analythic Hierarchy Process) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu." *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 5(1): 75.
- Dengen, Nataniel. 2009. "Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser." 4(1): 47–54.
- Dunn, William N. 2003. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua."
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *The Academy of Management Review*.
- Fama, Eugene F, and Michael C Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control Separation of Ownership and Control \*."
- Ferdiyanto, Yusriell Arief. 2019. "Perancangan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Web Studi Kasus Kantor Kelurahan Sumur Batu." XXI(1): 2017–20.
- Fika. 2020. "ANALISIS PENENTUAN SEKTOR DAN KOMODITI UNGGULAN

PEREKONOMIAN WILAYAH KOTA PALOPO.”

- Fikri, Rizalul, Ratih Nurpratiwi, and Choirul Saleh. 2015. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM.” 5(2).
- Gathungu, James. 2012. *Contextual Factors affecting e-government strategy implementation and its impact on public sector performance in Kenya*. Journal of Arts and Humanities (JAH) Volume 1 No 1, August 2012.
- Habibullah, Achmad. 2010. “Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan E-Government.” 23(c): 187–95.
- Hanif, Nurcholih. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasibuan, Zainal, A. 2007. Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda. Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 – No. 1 – April.
- Hertati, Diana. 2020. “MODEL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEB BAGI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.” *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*.
- Islamy, M. Irfan. 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jamal, Agung Laksana dkk. 2016. *Kajian tentang Fungsi Sistem Informasi perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dalam proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Poso*. e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016,
- Jogiyanto. 2009. *Sistem Informasi Manajemen..* Yogyakarta : Penerbit Andi
- Junaidi. 2005. *e-government dalam bingkai reformasi Administrasi Publik menuju Good Governance*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Volume 9 No 1, 59-60.
- Kapioru, Evan Harlan. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal Volume III Nomor 1 Tahun 2014.
- Kencana, Inu Syafii. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rinneka Cipta
- Kumayus, Citta Nadya Celine Wurara; Alfon Kimbal; Neni. 2020. “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado).” *Ilmu Pemerintahan* 2(5): 1–13.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mccubins, Arthur Lupia and Mathew D. 2000. “Representation or Abdiction?How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed.” *European Journal of Political Research*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publikations.

- Munthafa, Agnia Eva, Husni Mubarak, Jurusan Teknik, and Informatika Universitas. 2017. "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi." *Jurnal Siliwangi* 3(2): 192–201.
- Mungai, Alfred Ngugi. 2017. *E-Government Strategy Implementation and Performance of the Public Sector in Kenya*. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration (IAJHRBA) Volume 2 Issue 3, pp:301-338.
- Nugraha, Joko Tri. 2018. "E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN )." *Komunikasi dan Kajian Media*: 32–42.
- Pangerang, Moenta dan Anugerah, Pradana. 2017. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2021. *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023*.  
[http://www.dof.gov.my/en/c/document\\_library/get\\_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715](http://www.dof.gov.my/en/c/document_library/get_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara."
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2015. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin." 17(33): 81–95.
- Sitokdana, Melkior Nilar Ngalumsine. 2019. *Rencana Strategis Penerapan Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Papua*. Jurnal Komika Vol 8 No 1 Juni 2019.
- Sobri, Ahmad et al. 2019. "SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENT PADA KANTOR BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE OBJECT ORIENTED PROGRAMMING." *Teknologi Informasi Mura* 11(01): 47–54.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2005. "Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Bumh Yang Menderita Kerugian)." : Jurnal Mimbar Volume 21 No 3 Taun 2005 page 441–53.
- Subarsono. 2006. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Sugianing, Ni Ketut; Ketut Agus Seputra. 2019. "PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH." *Locus Majalah Ilmiah Fisip* 11(2): 112–33.
- Sujarweni, Wiratna. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Syahida, Agung Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Jurnal Umrah 1(1), 1-10 Tahun 2014.
- Syamsinar. 2016. *Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Sebaerang Kota Samarinda*. E-Journal Administrasi Negara 4(4):5161-5173
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tosepu, Asmawa. 2021. "Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah."
- Tunggal Agung, Catrina Ratu. 2022. *Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD*. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol 10 No 12 Mei.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2011. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Yohannes, Yohannes. 2013. *Strategi Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas TanjungPura.

# LAMPIRAN

### ***Lampiran 1 Pedoman Wawancara***

1. Apa peranan Bappeda dalam penyusunan dan pengelolaan SIPD? Apakah sudah diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan.
2. Mohon dijelaskan secara garis besar fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin ini?
3. Mohon dijelaskan mengenai Bidang Perencanaan Makro dalam Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan ruang lingkup pekerjaan terkait SKPD?
4. Mohon dijelaskan mengenai RKPD dalam dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah provinsi?
5. Mohon dijelaskan mengenai RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang disusun di tahun 2021?
6. Mohon dijelaskan mengenai SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menurut anda seperti apa detail perbedaan dalam penginputan data pada SIPD pengembangan pusdatin dengan SIPD yang sebelumnya?
7. Menurut anda seperti apa bentuk komunikasi yang terbangun oleh tim dalam pengelolaan SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan.
8. Bagaimana bentuk kejelasan dari peraturan terbaru mengenai SIPD yang anda pahami?
9. Bagaimana anda menilai kualitas staff dalam konsep implementasi SIPD di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara?
10. Bagaimana anda menilai mengenai sarana dan prasarana atau fasilitas dalam implementasi SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara?
11. Bagaimana pemahaman anda mengenai struktur akun dan pembagian akses pada SIPD pengembangan Pusdatin? Dan seperti apa anda melihat wewenang dari atasan terkait implemetansi SIPD ini?
12. Bagaimana menurut anda insentif yang diberikan khusus dalam penerapan implementasi SIPD ini?
13. Bagaimana dengan SOP terkait implementasi kebijakan SIPD di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara?

14. Bagaimana menurut anda terkait kondisi lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?
15. Bagaimana menurut anda terkait hubungan antar organisasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?
16. Bagaimana menurut anda terkait faktor sumber daya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?
17. Bagaimana menurut anda terkait Karakter Institusi Implemetor sebagai salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?
18. Bagaimana anda melihat dukungan regulasi dari SIPD ini?
19. Bagaimana anda melihat sarana dan prasarana sebagai aspek keunggulan dalam implementasi SIPD?
20. Bagaimana anda melihat ketercukupan anggaran sebagai salah satu keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara? Bagaimana anda melihat pengimplementasian SIPD dalam dukungan anggaran yang ada serta faktor lain yang dianggap mempengaruhi? Mohon dijelaskan
21. Bagaimana anda melihat SDM sebagai salah satu kelemahan dari penerapan SIPD di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan.
22. Bagaimana dengan SIPD dengan nomenklatur baru ini yang masih membutuhkan pemahaman yang mendalam lagi? Mohon penjelasan anda
23. Bagaimana anda melihat koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat terkait hal ini?
24. Menurut anda bagaimana komitmen pemda dalam penerapan SIPD?
25. Bagaimana menurut anda mengenai sosialisasi dan bimtek khusus terkait SIPD pengembangan Pusdatin ini?
26. Bagaimana menurut anda koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemprov Sultra dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD?

27. Apakah bentuk control dan pengendalian dari Bappeda berkurang dengan adanya SIPD pengembangan Pusdatin? Apakah itu bentuk tantangan yang anda temui?
28. Apakah benturan SIPD baru terkait nomenklatur merupakan bentuk tantangan atau hambatan dalam implementasi SIPD ini?



## **Lampiran 2 Hasil wawancara**

Narasumber :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Operator pengelola data dan informasi perencanaan SIPD
4. Operator input data perencanaan Bappeda ke dalam SIPD
5. Staf rencana penyusunan Renja Bappeda

1. Apa peranan Bappeda dalam penyusunan dan pengelolaan SIPD? Apakah sudah diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan  
Informan 1 : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu SKPD yang bertanggung jawab kepada Gubernur yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan daerah. SIPD sebagaimana Permendagri nomor 70 tahun 2019 sudah mengintegrasikan antara sisi perencanaan dan penganggaran di dalam pemerintahan daerah. Jika kita membahas peran Bappeda di dalam SIPD yang dimaksud oleh Permendagri nomor 70 tahun 2019 ini berarti kita membahas peran Bappeda di sisi perencanaan. Dan itu sudah kita implementasikan.

Informan 2 : SIPD kebijakan Permendagri nomor 70 tahun 2019 yang sekarang ini sebenarnya bukan baru sekarang diimplementasikan, tetapi jauh sebelumnya Bappeda sudah menggunakan SIPD sebagai media bantu pengelolaan data perencanaan. Bedanya SIPD dengan kebijakan baru ini sudah mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran serta terintegrasi nasional menggunakan satu *website*, sedangkan SIPD yang sebelumnya itu belum terintegrasi dengan penganggaran dan walaupun sudah berbasis elektronik akan tetapi masing-masing daerah mengembangkan aplikasi SIPD nya sendiri.

2. Mohon dijelaskan secara garis besar fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin ini?

Informan 1 : Se jauh ini Bappeda melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanat Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD yaitu dari sisi perencanaan sebagai pengelola data perencanaan, dalam hal ini Bappeda merencanakan data, mengumpulkan data, mendampingi SKPD mengisi data, memeriksa data kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan dalam hal ini saat ini digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 2020. Pada proses implementasinya selain Bappeda melibatkan SKPD untuk menginput, prosesnya didampingi juga oleh bidang mitra SKPD di Bappeda dan dikoordinatori oleh Bidang Perencanaan Makro. Aplikasinya sendiri dibantu oleh tim IT yang sudah dibentuk sejak Bappeda mengembangkan bersama SIPD sebelumnya dengan BPKP. Se jauh ini, belum ada keluhan dan kendala berarti dalam pembagian tugas ini, dikarenakan masih sesuai wewenang dan tupoksi bidang Perencanaan Makro dan tim IT, staf dan pejabat yang termasuk di dalamnya juga sudah sesuai kualifikasi dan berkualitas serta berintegritas tinggi dalam menjalankan peraturan ini dan bertanggung jawab, jadi dianggap pembentukan tim tersendiri untuk pengelola SIPD ini belum dibutuhkan

3. Mohon dijelaskan mengenai Bidang Perencanaan Makro dalam Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan ruang lingkup pekerjaan terkait SKPD?

Informan 2 : Bidang perencanaan makro dan tim IT mendukung penuh dan bertanggung jawab pada pengelolaan data perencanaan pembangunan SIPD ini, kuantitas dan kualitas SDM juga mencukupi untuk mendukung tugas ini, sesuai dengan tugas bidang Perencanaan Makro dalam mengelola data perencanaan dan menyusun dokumen perencanaan serta tim IT dalam mengelola aplikasi yang dimanfaatkan di lingkup Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, SIPD tidak hanya sisi perencanaan saja, juga ada penganggaran dan keterlibatan SKPD lainnya dalam pengisian data. Jadi akan lebih baik dan sesuai wewenang jika ada tim SIPD untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Mohon dijelaskan mengenai RKPD dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi?

Informan 2 : Dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menggunakan data yang terdapat di SIPD untuk penyusunan matriks rencana kerja perurusan, prioritas, sasaran, lokasi, indikator, target, dan pendanaan. Matriks ini disusun berdasarkan penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Informan 3 : Data yang ditarik dari basis data SIPD merupakan bahan matriks rencana kerja dan pendanaan pada dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Isinya berupa urusan perbidang, prioritas, sasaran, lokasi, indikator dan target serta pagu. Pengisiannya menggunakan Renja SKPD sebagai bahan.

5. Mohon dijelaskan mengenai RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang disusun di tahun 2021?

Informan 2 : Diarahkan pada pemetaan untuk RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 dan pemetaan tersebut digunakan di tahun 2021 untuk RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, kemudian akan dimutakhirkan pada 2022 untuk penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yaitu yang sementara disusun ini. Akan tetapi proses pemetaan itu sendiri tidak mudah mengingat bisa saja ada program yang tidak termuat di dalam nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 yang dijadikan acuan, hal itu masih menjadi kendala bagi pihak daerah dalam menyusun dokumen RKPD

6. Mohon dijelaskan mengenai SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menurut anda seperti apa detail perbedaan dalam penginputan data pada SIPD pengembangan pusdatin dengan SIPD yang sebelumnya?

Informan 2 : SIPD sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dikeluarkan pada sekitar akhir 2019, dimana pada saat itu kita telah selesai Perkada untuk RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, serta saat itu

berada pada sekitar pertengahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, sehingga baru bisa mulai diadaptasi pada tahap penyusunan RKPD saja, yaitu RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2021, saat RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2022 dan sekarang saat kita sedang menyusun RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 yang masih dalam proses finalisasi. Tidak seperti sebelumnya ketika SIPD pengembangan bersama dengan BPKP dipergunakan, pada SIPD yang sekarang dikembangkan Pusdatin, Bappeda bukan lagi produsen data utama, pihak SKPD juga sudah bisa mengisi data Renja OPD nya kedalam SIPD. Sedangkan sebelumnya keseluruhan pengisian data dilaksanakan oleh Bappeda setelah menerima data secara manual dari SKPD. Pada SIPD yang diimplementasikan dari Permendagri nomor 70 tahun 2019 Bappeda cukup memfasilitasi, mendampingi dan memverifikasi data Renja OPD saja.

Informan 3 : SIPD dari Pusdatin ini memungkinkan SKPD untuk mengisi data Renja OPD nya sendiri kedalam SIPD yang kemudian akan diperiksa dan dipergunakan saat akan melengkapi matriks rencana kerja dan pendanaan di RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Informan 4 : Pada *inputan* data Renja OPD sekarang sudah difasilitasi dengan SIPD sejak Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD diimplementasikan, sehingga SKPD tidak perlu lagi memberi data Renja OPD manual ke Bappeda. Ini dirasa lebih memudahkan, SKPD tidak perlu lagi menyusun matriks sendiri, di SIPD hanya memasukkan data pada dan akan ditampilkan dalam bentuk matriks setelah dimasukkan

7. Menurut anda seperti apa bentuk komunikasi yang terbangun oleh tim dalam pengelolaan SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa komunikasi dalam pengelolaan SIPD ini berjalan dengan baik sepengetahuan saya. Yang saya pahami, selama ini kendala yang ada selalu dari sisi penganggaran. Kalau soal hubungan Bappeda dengan TAPD dalam SIPD ini berjalan dengan baik menurut saya. Alhamdulillah.

Informan 3 : Menurut saya, sudah sangat jelas petunjuk teknis terkait SIPD ini. Beberapa peraturan sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sendiri.

Informan 4 : Yang saya tahu, peraturan atau aturan mengenai SIPD ini sudah sangat banyak dan jelas menurut saya. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah Peraturan Gubernur untuk menjadi petunjuk teknis (juknis) terkait operasionalisasi SIPD di lingkup Pemprov. Namun untuk sekarang, saya menganggap bahwa penjelasan dari aturan yang ada sudah sangat memadai

8. Bagaimana bentuk kejelasan dari peraturan terbaru mengenai SIPD yang anda pahami?

Informan 2 : Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan mendasar menurut saya dalam SIPD dengan nomenklatur baru ini dengan yang lama. Yang bermasalah memang proses transisi para operator dalam memahami isi nomenklatur dari SIPD yang baru dikeluarkan ini

Informan 3 : Kalau menurut saya, beberapa peraturan yang saya pribadi ketahui terkait SIPD ini tidak ada yang berbenturan atau bertentangan satu sama lain. SIPD dengan nomenklatur baru ini hanya memindahkan fitur-fitur yang ada di SIPD versi lama.

9. Bagaimana anda menilai kualitas staff dalam konsep implementasi SIPD di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara?

Informan 1 : Jika bertanya masalah kualitas SDM secara keseluruhan, secara normative saya harus katakan bahwa SDM dalam pengelolaan dan penerapan SIPD sudah memadai. Di beberapa SKPD atau OPD memang masih ada yang harus ditingkatkan, namun saya memahami bahwa kita ini masih proses belajar, terutama SIPD yang belum lama diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Informan 2 : Menurut saya, kualitas SDM dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah baik. Terutama yang ada di OPD Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Informan 3 : Menurut saya kualitas SDM dalam penerapan SIPD sudah memadai sekalipun masih ada beberapa yang masih harus ditingkatkan kemampuannya, namun mau dikatakan tidak mampu, juga tidak bisa dinyatakan seperti itu.

10. Bagaimana anda menilai mengenai sarana dan prasarana atau fasilitas dalam implementasi SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara?

Informan 1 : Yang bisa saya katakan, bahwa sarana dan prasarana yang kami siapkan di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memadai dalam pengelolaan SIPD ini. Sehingga saya menilai bahwa dari aspek ini, sudah terimplementasi kebijakan SIPD ini.

Informan 3 : Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi SIPD kalau dikerjakan di kantor (Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) sudah memadai, namun pekerjaan ini kan tidak selalu saya kerjakan di lingkungan kantor, namun juga bisa di rumah atau di luar yang belum tentu fasilitas internet dalam mendukung kerja-kerja saya dalam menginput SIPD.

Informan 4 : Menurut saya, sarana dan prasarana sudah cukup mendukung dalam optimalnya implementasi SIPD. Itu berbicara pada sarana dan prasarana di kantor Bappeda.

Informan 5 : Menurut yang saya pahami, kami sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kantor sehingga bisa lebih optimal dalam pelaksanaan implementasi SIPD ini.

11. Bagaimana pemahaman anda mengenai struktur akun dan pembagian akses pada SIPD pengembangan Pusdatin? Dan seperti apa anda melihat wewenang dari atasan terkait implelementasi SIPD ini?

Informan 3 : Akun TAPD Perencanaan dalam hal ini Bappeda akan membuka penjadwalan *input* Renja OPD, membuka kamus usulan aspirasi dan pokir, menentukan besaran pagu, menentuka mitra OPD yang ada di Bappeda, *upload* RKPD perbab, hasil *review* APIP, hasil pengendalian dan evaluasi, surat permohonan fasilitasi RKPD serta gambaran konsistensi program. Kemudian saat jadwal pengisian Renja OPD dibuka, akun dari level eselon 3 sudah mulai mengisi kegiatan, pagu dana kegiatan, lokasi dan waktu serta indikator keluaran sub kegiatan yang kemudian pada level eselon 2 menentukan indikator program, kelompok sasaran kegiatan, prioritas pembangunan nasional dan mengisi indikator keluaran hasil. Akses akun ini sebenarnya sudah mengikuti struktur birokrasi dan wewenang masing-masing jabatan dalam menentukan rencana kerja SKPD nya. Di Bappeda Provinsi pimpinan sudah mendelegasikan wewenang terkait hal ini kepada

level eselon III dan IV serta operator, Menurut saya hal ini sangat berarti sehingga sebagai staff kita juga mendapat motivasi dan dukungan bekerja dari atasan kita.

Informan 4 : Akun TAPD Perencanaan dalam hal ini Bappeda akan membuka penjadwalan *input* Renja OPD, membuka kamus usulan aspirasi dan pikir, menentukan besaran pagu, menentuka mitra OPD yang ada di Bappeda, *upload* RKPD perbab, hasil *review* APIP, hasil pengendalian dan evaluasi, surat permohonan fasilitasi RKPD serta gambaran konsistensi program. Kemudian saat jadwal pengisian Renja OPD dibuka, akun dari level eselon 3 sudah mulai mengisi kegiatan, pagu dana kegiatan, lokasi dan waktu serta indicator keluaran sub kegiatan yang kemudian pada level eselon 2 menentukan indicator program, kelompok sasaran kegiatan, prioritas pembangunan nasional dan mengisi indikator keluaran hasil. Akses akun ini sebenarnya sudah mengikuti struktur birokrasi dan wewenang masing-masing jabatan dalam menentukan rencana kerja SKPD nya. Di Bappeda Provinsi pimpinan sudah mendelegasikan wewenang terkait hal ini kepada level eselon III dan IV serta operator, Menurut saya hal ini sangat berarti sehingga sebagai staff kita juga mendapat motivasi dan dukungan bekerja dari atasan kita

Informan 5 : Dalam pengisian renja OPD masing-masing pejabat eselon mengakses data sesuai wewenangnya, operator *input* hanya menyesuaikan kembali data hasil pengisian dan beberapa rencana kerja program dan kegiatan yang sifatnya rutin berulang setiap tahun jika di Bappeda sebagai OPD seperti monitoring dan evaluasi biasanya tetap dipegang oleh seksi perencanaan SKPD hanya akses pejabat eselon dilakukan secara manual. Sehingga menurut saya sudah ada kewenangan yang diberikan kepada staff jika berbicara mengenai pelaksanaan SIPD ini. Tidak semua atasan mampu mengerjakan jika tidak dibantu oleh para staffnya.

12. Bagaimana menurut anda insentif yang diberikan khusus dalam penerapan implementasi SIPD ini?

Informan 1 : Tim khusus terkait SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada, karena Bappeda sendiri sudah mempunyai Tim IT yang menangani beberapa aplikasi termasuk aplikasi SIPD. Mungkin kedepannya bisa

dipertimbangkan Tim Khusus tersebut yang diinisiasi oleh BPKAD dan penganggarannya juga dari mereka

Informan 2 : Memang harus diakui bahwa insentif khusus itu belum ada sebagaimana yang ditanyakan, namun semangat kerja teman-teman baik di Bappeda maupun OPD lain di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara tetap terjaga dalam mengimplementasikan SIPD ini. Tapi kedepannya, ini juga menjadi bahan masukan bagi pimpinan termasuk pimpinan daerah untuk memikirkan bagaimana insentif ini untuk pengelola SIPD di tiap-tiap OPD sehingga kinerja mereka tetap terjaga,

Informan 3 : Tidak ada insentif khusus terkait kebijakan ini menurut saya. Namun sebagai ASN, tentu patokan kita tidak selamanya hanya dari diberikannya insentif atau tidak, walau saya pribadi akui itu bagian dari memotivasi para pekerja yang bekerja maksimal demi diimplmentasikannya SIPD ini .

Informan 4 : Belum ada insentif khusus jika itu yang ditanyakan. Mungkin menurut saya, perlu dipertimbangkan adanya insentif khusus entah itu dari SKPD masing-masing ataupun dibuatkan dari daerah sehingga mampu mendorong semangat kerja dan motivasi dari mereka yang terlibat.

13. Bagaimana dengan SOP terkait implementasi kebijakan SIPD di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara?

Informan 2 : Menurut saya, SOP SIPD sudah termaktub dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan menjadi rujukan bagi pengelola SIPD dalam melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing. Sampai sekarang belum ada rujukan turunan dari Permendagri berupa Pergub karena menurut pemahaman pimpinan dan saya pribadi, Acuan dari Permendagri ini masih cukup jelas dan mudah dipahami oleh para implementator yang melakukan penginputan SIPD ini.

Informan 3 : SIPD dengan nomenklatur baru ini dikembangkan oleh Pusdatin Kemenristekdikti yang merupakan integrasi perencanaan dan penganggaran. SOP SIPD ini ada pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Hanya memang sedikit ada permasalahan dalam implementasi kebijakan ini terutama perspektif penganggaran dan perencanaan dari sudut pandang



masing-masing. Namun secara keseluruhan, pengelolaan SIPD sudah sangat jelas diatur dalam peraturan terakhir

14. Bagaimana menurut anda terkait kondisi lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?

Informan 1 : Penanganan kebijakan SIPD ini juga melibatkan unsur kebijakan daerah terutama dalam pemahaman kami dari aspek perencanaan sehingga kami merasa bahwa jika terjadi ketidakharmonisan dalam proses berjalannya implementasi SIPD ini tentu akan menjadi cerminan masyarakat sehingga hal ini mendorong kami untuk bekerja maksimal dan professional dalam penerapan atau implementasi SIPD ini.

15. Bagaimana menurut anda terkait hubungan antar organisasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?

Informan 1 : Menurut saya hubungan yang sudah terjalin selama ini sudah berlangsung baik dan harmonis, Tidak ada masalah. Ini juga mungkin faktor yang sangat mendukung bagaimana implementasi SIPD berjalan dengan baik di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa hubungan yang dibangun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SKPD lain di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik, begitupun dengan hubungan atau komunikasi kami dengan pemerintah pusat, ketika kami mengalami permasalahan yang kami hadapi dalam implementasi SIPD

16. Bagaimana menurut anda terkait faktor sumber daya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?

Informan 1 : Saya yakin dan percaya bahwa manusia adalah unsur utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Sehebat apapun kualitas rencana dan kebijakan tanpa didukung oleh keterlibatan orang-orang yang berkualitas maka tentu tidak akan mungkin berpengaruh semua rencana yang telah dibuat. Begitupun dalam implementasi SIPD ini,

saya pribadi orang yang terus menerus mendorong pentingnya perbaikan kualitas SDM sehingga secara langsung dan tidak langsung akan mendongkrak keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sumber daya lain menurut saya adalah terkait anggaran, dan Alhamdulillah Bappeda siap untuk menganggarkan terkait pengelolaan SIPD karena kami paham bahwa dengan anggaran memadai maka kebijakan yang dimaksud akan mampu berjalan lebih optimal

Informan 2 : Saya termasuk orang yang percaya bahwa kualitas SDM akan sangat mempengaruhi keberhasilan kerja atau kinerja suatu organisasi. Hal itu termasuk dalam optimalnya penerapan SIPD yang kita sedang kerjakan. Begitu besarnya dampak SDM itu menuntut setiap pembaharuan aturan itu perlu dibarengi dengan adanya pengembangan kapasitas SDM yang ada di dalamnya. Menurut saya, faktor SDM merupakan salah satu aspek atau faktor yang sangat mempengaruhi baik dalam artian positif maupun negative bagi keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya juga yakin dan percaya bahwa sisi anggaran yang cukup akan mendukung efektifnya pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan SIPD ini, harus didukung oleh anggaran yang memadai.

Informan 3 : Tidak ada keberhasilan rencana, program ataupun kebijakan yang tidak diikuti dengan kemampuan orang-orang di dalamnya. Hal ini juga termasuk kalau mau mengimplementasikan SIPD versi terbaru yang membutuhkan SDM-SDM yang berkompeten mulai dari memahami aturan terbaru, skema kerja SIPD versi terbaru, cara mengatasi permasalahan mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga tidak akan mungkin berhasil pemahaman atau menerapkan SIPD kalau SDM nya tidak kompeten atau tidak berkualitas.

Informan 5 : Tentu saja, SDM yang berkualitas akan mendorong keberhasilan dari program atau kebijakan yang diterapkan. Mau bagus bagaimana program, kalau tidak didukung oleh SDM yang mumpuni dan cakap, maka tidak akan jadi itu rencana. Begitu juga dengan mau jadi atau bagus implementasi SIPD, kalau orang-orang di dalamnya yang terlibat tidak kompeten, maka tidak akan pernah baik itu SIPD dalam tataran implementasinya

17. Bagaimana menurut anda terkait Karakter Institusi Implemetor sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi Tenggara?

Informan 2 : Kami di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mensukseskan SIPD ini. Keberhasilan implementasi SIPD ini tidak hanya akan tergantung pada satu badan atau SKPD namun kerja bersama sehingga hal ini mendorong setiap dari kami untuk mampu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain.

18. Bagaimana anda melihat dukungan regulasi dari SIPD ini?

Informan 2 : SIPD ini menggunakan nomenklatur baru dalam penunjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan hasil pengembangan dari Pusdatin yang mengganti dari SIPD lama yang dikeluarkan oleh Banda Kemendagri. Tentu dengan adanya aplikasi ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan itu sudah sangat jelas dalam petunjuk teknis dan operasional aplikasi SIPD pengembangan Pusdatin ini

Informan 3 : Penerapan SIPD dengan nomenklatur baru ini didukung dengan regulasi atau peraturan pemerintahan yang jelas sehingga kita di lapangan mempunyai dasar dalam penerapan SIPD

19. Bagaimana anda melihat sarana dan prasarana sebagai aspek keunggulan dalam implementasi SIPD?

Informan 1 : Fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang seperti fasilitas internet sudah memadai dalam penerapan aplikasi SIPD dengan nomenklatur baru. Belum ada kendala yang saya dengar dari staff terkait hal ini. Dan hal ini saya anggap menjadi keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Informan 3 : Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi SIPD kalau dikerjakan di kantor (Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) sudah memadai, namun pekerjaan ini kan tidak selalu saya kerjakan di lingkungan kantor, namun juga bisa diruman atau di luar yang belum tentu fasilitas internet dalam mendukung kerja-kerja saya dalam menginput SIPD.

20. Bagaimana anda melihat ketercukupan anggaran sebagai salah satu keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara? Bagaimana anda melihat pengimplementasian SIPD dalam dukungan anggaran yang ada serta faktor lain yang dianggap mempengaruhi? Mohon dijelaskan

Informan 1 : Sejauh ini pengimplementasian SIPD memang terkadang terkendala, dan jika memang dibutuhkan daerah akan memfasilitasi sosialisasi langsung pihak Pusdatin selaku pengembang untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memanfaatkan SIPD di daerah. Sumber pembiayaan dapat digunakan dari APBD dalam rangka peningkatan mutu SDM dan kelancaran informasi dan pelaksanaan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara

Informan 2 : Bappeda sebagai leading sector sudah menyiapkan anggaran yang cukup dalam menerapkan atau mengimplementasikan program SIPD ini. Tidak ada masalah terkait penyiapan anggaran untuk implementasi kebijakan ini

21. Bagaimana anda melihat SDM sebagai salah satu kelemahan dari penerapan SIPD di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan.

Informan 2 : Belum semua SKPD memang mempunyai SDM yang memadai dalam menerapkan SIPD sehingga ini juga membutuhkan tanggung jawab Bappeda sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara

Informan 3: Harus kita akui bahwa kualitas SDM dalam mengimplementasikan SIPD di setiap SKPD lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara belum merata, namun secara keseluruhan kualitas SDM sudah agak memadai

22. Bagaimana dengan SIPD dengan nomenklatur baru ini yang masih membutuhkan pemahaman yang mendalam lagi? Mohon penjelasan anda

Informan 1 : Saya pikir, sebagai suatu aplikasi yang baru akan membutuhkan waktu untuk dipahami. Hal itu juga terjadi dalam pemahaman sebagian besar operator SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara yang harus mentransmigrasikan pemahaman mereka dari aturan lama menjadi aturan

baru (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019) sebagai acuan dari SIPD versi baru.

Informan 2 : Sebelumnya SIPD pengembangan bersama BPKP yang terintegrasi ke Bangda mengacu pada nomenklatur Permendagri nomor 13 tahun 2006. Penerapan SPBE menganggap perlu untuk mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran sehingga hadir SIPD pengembangan Pusdatin yang mengintegrasikan keduanya dan mengacu pada nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2019. Ketika hendak dipertemukan antara nomenklatur lama dan baru menjadi tidak klop dikarenakan satu dominan sisi perencanaan dan satu dominan sisi penganggaran. Sedangkan jika disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 itu masih mengacu pada nomenklatur Permendagri nomor 13 tahun 2006 di program dan kegiatannya. Tetapi kendala-kendala seperti ini mungkin terjadi sebab SIPD yang sekarang masih dalam tahap pengembangan. Hal itu menurut saya tentu membutuhkan pemahaman mendalam dari setiap pengelola SIPD terutama yang berada di SKPD lain. Tantangan migrasi dari SIPD dengan perbedaan nomenklatur ini tentu saja membutuhkan inovasi kita untuk tetap bekerja sesuai dengan tupoksi. Sehingga pada saat kami menyusun RKPD pertama menggunakan SIPD pengembangan Pusdatin, kami diarahkan melakukan pemetaan sesuai dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 untuk penyusunan RKPD untuk tahun 2021, karena banyak nomenklatur yang SIPD lama dan SIPD baru tidak sama.

Informan 3 : SIPD yang dikeluarkan oleh Pusdatin ini tentu saja membutuhkan waktu untuk dipahami sejak mulai diluncurkan akhir tahun 2019. Persoalan yang sering dihadapi adalah masalah pemahaman terkait SIPD ini. Yang saya lihat salah satu masalah disini, terutama terkait nomenklatur yang ada dalam SIPD versi lama dan versi baru. Hal itu akhirnya terimplikasi di lapangan, dimana masih banyak SKPD di lingkup Pemrprov Sulawesi Tenggara menggunakan aturan lama (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan sistem SIPD baru menggunakan aturan baru (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD) yang tentu saja nomenklaturnya berbeda

23. Bagaimana anda melihat koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat terkait hal ini?

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa hubungan yang dibangun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SKPD lain di lingkup pemprov Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik, begitupun dengan hubungan atau komunikasi kami dengan pemerintah pusat, ketika kami mengalami permasalahan yang kami hadapi dalam implementasi SIPD

Informan 3 : Koordinasi dan komunikasi yang terbangun antara kami dengan teman-teman di Pemerintah Pusat berjalan dengan baik. Kita punya WA grup yang memudahkan jika kami di daerah mengalami permasalahan, kendala dan hambatan dalam penerapan SIPD ini.

Informan 4 : Ada grup melalui media social *whatsapp* yang mewadahi konsultasi *online* dengan pihak Pusdatin selain itu grup ini juga berfungsi untuk memberikan informasi terkait status *website* SIPD jika ada pemeliharaan sehingga portalnya harus ditutup sementara. Komunikasi sesama operator OPD, pengelola dan Pusdatin juga terjalin dengan baik di dalam grup tersebut sehingga meminimalisir kesalahan informasi.

24. Menurut anda bagaimana komitmen pemda dalam penerapan SIPD?

Informan 1 : Sangat jelas, komitmen pemda dalam hal ini Pak Gubernur mendorong kita semua untuk menerapkan SIPD versi terbaru..

Informan 2 : Tentu saja, pemda Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki komitmen yang jelas supaya pemda ini secepatnya menggunakan aplikasi SIPD ini sesuai arahan dari pemerintah pusat.

25. Bagaimana menurut anda mengenai sosialisasi dan bimtek khusus terkait SIPD pengembangan Pusdatin ini?

Informan 1 : Sejauh ini pengimplementasian SIPD memang terkadang terkendala, dan jika memang dibutuhkan daerah akan memfasilitasi sosialisasi langsung pihak Pusdatin selaku pengembang untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memanfaatkan SIPD di daerah. Sumber pembiayaan dapat digunakan dari APBD dalam rangka peningkatan mutu SDM dan kelancaran informasi dan pelaksanaan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Informan 2 : Sosialisasi langsung oleh pihak pengembang Pusdatin dan Kemendagri sendiri masih dibutuhkan oleh SDM di Bappeda dan OPD, SDM yang tersedia kompeten akan tetapi SIPD ini masih perlu lebih sering disosialisasikan, jika ada perubahan *tools* dan sarana daerah untuk memberi masukan dalam pengembangan aplikasi SIPD ini. Terkait pembiayaan daerah siap jika ini untuk meningkatkan kualitas SDM

Informan 4 : Sosialisasi maupun Bimtek yang diadakan oleh Pemerintah Pusat menurut saya sangat mendukung kita-kita yang menjadi staff SIPD

Informan 5 : Menurut saya, bentuk dukungan pemerintah ya mengintensifkan sosialisasi dan bimtek khusus SIPD. Itu akan mendorong optimalnya implementasi kebijakan atau aturan ini hingga tataran teman-teman di SKPD lainnya.

26. Bagaimana menurut anda koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemprov Sultra dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD?

Informan 1 : Kami di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mensukseskan SIPD ini. Keberhasilan implementasi SIPD ini tidak hanya akan tergantung pada satu badan atau SKPD namun kerja bersama sehingga hal ini mendorong setiap dari kami untuk mampu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain

27. Apakah bentuk control dan pengendalian dari Bappeda berkurang dengan adanya SIPD pengembangan Pusdatin? Apakah itu bentuk tantangan yang anda temui?

Informan 2 : Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penginputan SIPD dengan nomenklatur baru adalah terkait fungsi pengendalian dari Bappeda. Hal ini saya dapati terkait masalah penginputan di SIPD dengan nomenklatur baru dari beberapa OPD (SKPD) padahal menurut saya, fungsi penginputan dari system baru ini harusnya dimudahkan. Hal ini sebenarnya memudahkan setiap pengelola SIPD ini mampu mengisi tapi entahlah kenapa banyak SKPD masih kesulitan dalam SIPD dengan nomenklatur baru ini. SIPD yang dikembangkan oleh Bangda Kemendagri dimana setiap tahapan itu benar-benar diurut, mulai dari

penginputan SK tim, lalu masuk tahap susunan rancangan awal, lalu rancangan hasil konsultasi public sehingga akan dapat terkontrol. Kalau SIPD yang menggunakan nomenklatur baru ini sedikit berbeda dengan SIPD dengan nomenklatur lama yang dirancang oleh Bangda Kemendagri. Dengan adanya SIPD baru ini mengurangi atau melemahkan fungsi kontrol dari Bappeda dimana menurut saya, tugas Bappeda adalah memverifikasi setiap usulan dari SKPD (target dan indikator). Ini menurut saya tantangan dan mungkin bisa menjadi masukan bagi pengembang SIPD terbaru ini Informan 3 : Hilangnya kontrol dari sistem dimana jika ada SKPD yang kosong dalam menginput yang membuat hal ini bisa saja menjadi tantangan atau kendala dalam penerapan SIPD. Banyak pengalaman yang saya dapat, dimana kadang-kadang ada SKPD yang tidak mengisi datanya, namun juga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini membuat saya berpikir, kita sebagai staff di Bappeda kurang memiliki kontrol dan pengendalian dalam penerapan SIPD dengan nomenklatur baru

28. Apakah benturan SIPD baru terkait nomenklatur merupakan bentuk tantangan atau hambatan dalam implementasi SIPD ini?

Informan 2 : Menurut saya rumitnya SIPD dengan nomenklatur baru ini karena SIPD ini menggunakan aturan terbaru, sementara dalam proses perencanaan yang dijalankan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara menggunakan aturan lama sehingga tentu saja akan ada benturan atau pertentangan. Bagi daerah yang sudah merevisi RJMD, tentu mudah untuk melakukan penyesuaian dengan aturan terbaru, dan Sulawesi Tenggara belum termasuk daerah yang merevisi RPJMD yang menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru

Informan 3 : Menurut saya pribadi, perbedaan nomenklatur dalam SIPD dengan nomenklatur lama dan yang baru sedikit banyak menghambat atau menjadi kendala dalam penerapan SIPD.



### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak J. Robert, ST., MT



Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Hasrullah, S.STP., M.Si



Wawancara peneliti dengan Operator pengelola data dan informasi perencanaan SIPD, Bapak Joko Balaka, SE.,M.Si



Wawancara peneliti dengan Operator Input Data Perencanaan Bappeda ke dalam SIPD, Bapak Arsal, SE



Wawancara peneliti dengan Staf perencana SIPD Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara,  
Ibu Wa Ode Hermina, S.P., M.M



Fasilitas Sarana prasarana yang mendukung  
di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara